

Bab II

Perkembangan Gagasan Neoliberalisme dalam Dunia Internasional

Perjalanan neoliberalisme sebagai sebuah ide yang diterima bersama oleh dunia internasional tidak lepas dari proses sejarah ekonomi-politik suatu bangsa dan peranan aktor-aktor yang bertindak dengan cara 'kenabian'. Gagasan ini tidak serta merta lahir secara alamiah maupun naluriah. Sebagai sebuah wacana dominan, neoliberalisme disibukkan dengan sebuah sinisme yang berkembang di dunia akan teori ekonomi politiknya yang hanya mendatangkan petaka. Dalam pandangan yang berbeda, kaum neoliberal pun secara empiris berusaha mengkultuskan neoliberalisme sebagai 'mantra mujarab' bagi negara yang mengalami pesakitan ekonomi dan kesejahteraan. Neoliberalisme yang awalnya lahir dari sebuah rahim gagasan holistik ekonomi, kesejahteraan manusia paling bisa dicapai dengan cara meliberalisasikan kebebasan dan keterampilan entrepreneurial individu dan menempatkan kebebasan dan keterampilan itu ke dalam suatu kerangka pranata yang dicirikan oleh hak milik pribadi yang kuat, pasar bebas dan perdagangan bebas. Keberadaan neoliberalisme ini bisa saja menjadi ancaman ataupun peluang bagi negara. Dalam dimensi yang seperti apa bisa ditemukan segala kemungkinan yang menjadikannya ancaman ataupun peluang? Oleh karenanya perjalanan historik menjadi pijakan menarik untuk menarik benang merah perjalanan gagasan neoliberalisme. Bahkan David Harvey dalam tulisannya menjabarkan tentang adanya kontradiksi dalam tubuh neoliberalisme itu sendiri, baik dari segi teori dan prakteknya dalam realitas. Dari luasnya studi

mengenai neoliberalisme, maka penulis hanya akan membahas beberapa hal yang sekiranya menjadi pendukung wilayah analisa deskriptis pembahasan yakni berfokus pada genealogi gagasan neoliberalisme, ekonomi politik, praktik neoliberalisme dalam negara, dan kekuatan di balik eksistensi neoliberalisme sebagai ideologi dominan di dunia dalam hal ekonomi politik.

A. Ekonomi-politik neoliberalisme

Pokok gagasan ekonomi politik neoliberal adalah argument bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal jika dan hanya jika, lalu lintas barang/jasa/modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Optimalisasinya pun juga hanya akan terjadi bila barang, jasa, dan modal dimiliki/dikuasai oleh orang-perorangan yang akan menggerakannya untuk tujuan akumulasi laba pribadi, seperti halnya konsep *homo economicus*²⁵.

Bertolak dari konsep *homo economicus* ini pemahaman liberalisme menjadi kebutuhan ideologis yang tidak bisa diingkari atau ditolak. Mahluk ekonomi selalu melibatkan dirinya dalam ruang-ruang ekonomi yang baik sengaja ataupun tidak dibentuk oleh naluri berpikir manusia dengan segala aktivitasnya. Karena sifatnya

²⁵ Tindakan dan hubungan panta pribadi manusia maupun tindakan dan hubungan legal, sosial dan politis hanyalah ungkapan dari model hubungan menurut kalkulasi untung-rugi individual yang terjadi dalam transaksi ekonomi. Inilah yang menjadi ontologi manusia dalam konsep *homo economicus*. Dalam bahasa Gary Becker, salah seorang ekonom Mazhab Chicago, "ekonomi memberikan semesta pendekatan paling komprehensif untuk memahami semua perilaku manusia..." dalam Herry Priyono, *Dalam...Op. Cit.*, hlm. 14

yang sangat individual, maka bisa dimaklumi ketika gagasan liberal ini mencoba memaksakan gagasannya dalam wujud individualisme.

Jika dalam liberalisme ekonomi abad ke-19, prinsip pasar diterapkan dalam pengadaan barang seperti, misalnya, pakaian dan perhiasan, dalam proyek neo-liberalisme prinsip itu diterapkan juga untuk pengadaan pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara,²⁶

Pertama, dengan proyek normatif memandang semua relasi manusia sebagai relasi pasar, neo-liberalisme mengajukan *homo oeconomicus* sebagai teori kodrat manusia yang diterapkan dalam bidang politik, hukum, sosiologi, psikologi, sejarah, kriminologi, dan seluruh ilmu-ilmu manusia serta humaniora. Karena penjelmaan paling sempurna *homo oeconomicus* adalah pelaku bisnis, model cara-berpikir dan cara-bertindak adalah sosok pengusaha. Pengusaha adalah model manusia sejati, dan karena itu juga punya status istimewa dalam proyek neo-liberal. Itulah yang menjelaskan mengapa para eksekutif perusahaan, “yang pada masa lalu dipandang dengan sebelah mata, tiba-tiba kini laksana para pangeran yang gagah menunggang kuda putih”

Kedua, karena model manusia sejati adalah pengusaha, setiap orang perlu melihat dan mengubah dirinya sesuai idiom bisnis dan pasar. Artinya, apa saja yang ada padanya – dari uang sampai tanah, dan dari kecantikan sampai ijazah adalah modal (*capital*) yang mesti diubah menjadi laba, sama seperti cara-berpikir dan

²⁶ Herry Priyono, *Neoliberalisme...*, *Op. Cit.*, hlm. 7-8

bertindak sang pengusaha kayu yang mengubah hijau hutan menjadi kayu gelondongan dan laba. Ringkasnya, “seluruh gugus relasi kehidupan adalah perusahaan”. Dengan itu berkembang “iklim kultural baru, yaitu tata-kelola identitas diri dan relasi-relasi yang didasarkan pada kapitalisasi kehidupan”. Ekonom Ben Fine yang melacak problematik ini sampai pada kesimpulan bahwa istilah ‘modal kultural’, ‘modal sosial’ dan ‘modal spiritual’ yang luas dipakai dewasa ini tidak diambil dari pengertian yang pernah diajukan Pierre Bourdieu, pemikir Perancis, tetapi dari proyek ekspansi idiom neo-liberal.

Ketiga, karena setiap orang adalah pengusaha swasta, apabila ia jatuh menganggur atau miskin, itu disebabkan kesalahannya sendiri. Kemiskinan dan pengangguran bukan masalah sosial, melainkan kegagalan mengubah aset-diri menjadi laba. Solusinya bukan *social welfare*, tetapi *individual self-care*. Karena soalnya *individual self-care*, program jaminan sosial kehilangan alasan adanya. Meskipun neo-liberalisme tidak identik dengan privatisasi, kita segera mengerti apa yang terjadi di balik gelombang privatisasi bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Tidak ada kesehatan, tetapi bisnis rumah-sakit; tak ada pendidikan, tapi bisnis sekolah. Bukan pasien, melainkan konsumen pengobatan, bukan guru, melainkan penjual pelajaran. Pada akhirnya tak ada lagi perbedaan antara ‘ekonomi pasar’ (*market economy*) dan ‘masyarakat pasar’ (*market society*), lantaran seluruh gugus relasi yang membentuk ‘masyarakat’ telah diubah menjadi relasi pasar.

Keempat, dari situ hanya butuh langkah kecil untuk melihat implikasinya bagi tata-negara. Sesudah *homo oeconomicus* menjadi model perilaku manusia (dan logika pasar menjadi prinsip koordinasi masyarakat), ‘pemerintah’ (*government*) menjadi pemerintah ekonomi (*economic government*). Menyebut “negara sebagai perusahaan adalah idiom khas neo-liberal, dan bukan liberal”. Para pejabat pemerintah adalah “pengusaha” yang menjual kota, wilayah, atau sumberdaya apa saja yang bisa ditawarkan kepada investor. *Policy* disebut sukses bila pengusaha berdatangan melakukan investasi, dalam pertanian maupun *mall*, sekolah maupun rumah-sakit. Pada akhirnya prinsip pasar tampil sebagai hakim yang mengadili apakah kebijakan disebut sukses atau gagal; bukan hanya dalam produksi sepeda motor, tetapi juga dalam pengadaan pendidikan dan kesehatan. *Trend* menilai sukses-gagalnya semua kebijakan pemerintah menurut kesesuaiannya dengan prinsip pasar ini juga bukan kecenderungan liberal, melainkan khas neo-liberal.

Kelima, ada *trend* menarik lain. Perentangan prinsip pasar tidak hanya dilakukan ke bidang-bidang yang secara tradisional bukan wilayah ekonomi, tetapi juga dijalankan dengan menciptakan cabang serta ranting transaksi baru dari transaksi-transaksi yang sudah ada. Dalam transaksi pasar antara si A dan B, misalnya, diciptakan sekian banyak sub-transaksi turunannya. Dengan itu terjadilah ledakan transaksi pasar, ledakan proses kapitalisasi, dan laba diciptakan dari relasi-relasi yang pada awalnya tidak dianggap menghasilkan laba. Maka, tulis David Harvey, “neoliberalisme juga berarti finansialisasi segalanya”. Cukup pasti, ledakan

dan kecepatan pembengkakan volume transaksi pasar ini sangat dibantu oleh revolusi teknologi komunikasi. Dengan itu terjadi kontrol makin besar oleh sektor ekonomi finansial atas sektor-sektor ekonomi lain, bahkan atas aparatus negara serta arus kehidupan sehari-hari.

Bila dalam liberalisme klasik pemilikan privat (*private property*) masih dianggap punya tugas sosial untuk menyejahterakan masyarakat (dalam gagasan Smith), dalam neoliberalisme *private property* menjadi absolute dan keramat, tanpa peran sosial apapun juga kecuali untuk akumulasi laba privat (dalam gagasan Friedman).

Dalam wilayah Negara, gagasan neoliberalisme selalu punya alasan kuat tentang privatisasi dan deregulasi. Ada anggapan yang berkembang bahwa kebijakan deregulasi dan privatisasi oleh neoliberalisme ini berusaha memangkas peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi sampai tahap di mana otoritas legitimasi pemerintah untuk mengelola suatu negara habis. Hal ini tentu saja tidak sepenuhnya salah namun juga tidak bisa dipahami dengan sesederhana itu. Gagasan neoliberal tentang pemerintah tidak menghapuskan kekuasaan pemerintah lalu memindahkannya ke tangan individu-individu atau swasta. Sebaliknya Negara dalam gagasan neoliberal tidak hanya diharuskan untuk mempertahankan peran tradisionalnya, tetapi juga dibebani oleh tugas-tugas baru. Tugas baru ini pun tidak turut mengintervensi secara langsung kepada individu hanya berupa pengembangan teknik-teknik mengontrol warga tanpa harus bertanggung jawab terhadap warga.

Neoliberalisme hanya mengawasi pelaku wirausaha yang otonom sedangkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, ataupun kekurangan gizi tidak lagi menjadi persoalan negara melainkan tanggung jawab setiap warga. Masalah-masalah tersebut dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis setiap individu dalam dunia wirausaha. Masalah yang awalnya dikategorikan sebagai masalah sosial (pengangguran, kemiskinan) oleh neoliberalisme diubah menjadi masalah individu. Maka solusinya pun bukanlah sebuah program sosial, melainkan individual *self care*. Perlu adanya kesadaran individu dalam memposisikan dirinya sebagai pelaku ekonomi dan individu sebagai pelaku moral bagi dirinya sendiri.

Dalam diskursus kritis di atas tentang neoliberalisme, dapat digambarkan bahwa neoliberalisme merupakan sebuah proyek politik yang berusaha menjelaskan berbagai perkara dalam hidup masyarakat dengan menjadikan persoalan 'ekonomi' sebagai muaranya. Selain itu, neoliberalisme berusaha memetakan permasalahan masyarakat dalam wilayah individu, masalah *social welfare* menjadi wilayah yang *self care*. Hal ini pun berlaku bagi organisasi-organisasi seperti perusahaan swasta, sekolah, maupun departemen pemerintah yang dikategorikan sebagai *entrepreneurial bodies*.

Isu ekonomi dalam neoliberalisme selalu memposisikan politik dan isu sosial tidak secara terpisah. Joseph Stiglitz, mantan Kepala Ekonom Bank Dunia (1997-2000) berpendapat bahwa globalisasi ekonomi dalam bentuk yang sekarang beresiko memperparah kemiskinan dan meningkatkan kekerasan jika tidak diawasi dengan

baik, oleh karenanya sangat tidak mungkin untuk memisahkan isu ekonomi dari isu-isu sosial dan politik. Bahkan J.W. Smith mengatakan,

*"One cannot separate economics, political science, and history. Politics is the control of the economy. History, when accurately and fully recorded, is that story. In most textbooks and classrooms, not only are these three fields of study separated, but they are further compartmentalized into separate subfields, obscuring the close interconnections between them."*²⁷

"Seseorang tidak dapat memisahkan ekonomi, ilmu politik, dan sejarah. Politik adalah pengendali ekonomi. Sejarah, ketika secara tepat dan sepenuhnya tercatat menunjukkan cerita sesungguhnya. Dalam sebagian besar buku pelajaran dan ruang studi, bukan saja tiga bidang studi ini yang terpisah, tetapi juga mereka lebih terkotak menjadi subbidang terpisah, menyamarkan keterkaitan yang erat antara mereka.. "

Bisa dikatakan isu ekonomi dan politik menjadi sebuah kajian yang tak terpisahkan. Selalu ada kesinambungan antar studi tersebut ketika dihadapkan pada realitas yang terjadi di masyarakat, meski pada ruang studi kita menemukan perbedaan yang mengkotak-kotakkannya dalam satu pemahaman yang berbeda. Setiap kebijakan ekonomi pasti ada unsur politiknya yang menjadi rasionalisasi kebijakan. Begitupun sebaliknya kebijakan politik selalu menyertakan kebijakan ekonomi di dalamnya dalam sebuah sistem negara maupun pasar.

²⁷ J.W. Smith, *The World's Wasted Wealth 2*, Institute for Economic Democracy, 1994, hal 22 dalam Anup Shah, *A Primer on Neoliberalism*, diakses dari <http://www.globalissues.org/article/39/a-primer-on-neoliberalism#globalissues-org>, pada 1 Juli 2013.

B. Sejarah Perkembangan Neoliberalisme di Beberapa Negara

Praktik neoliberal pertama kali dipraktikkan di negara Amerika Latin yakni Chili. Neoliberalisme di Chili mulai diberlakukan paska kudeta Pinochet²⁸ pada 11 September 1973 terhadap pemerintahan Salvador Allende yang terpilih secara demokratis. Kudeta ini dilakukan oleh karena para pebisnis di Chili yang kurang begitu menyukai kebijakan Allende yang cenderung ke arah sosialis. Kudeta itu bahkan mendapat dukungan penuh dari korporasi-korporasi Amerika Serikat, CIA, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger.²⁹ AS menyediakan dukungan material kepada rezim militer setelah kudeta. Sebuah dokumen yang dirilis oleh Badan Intelijen Pusat AS (CIA) pada tahun 2000, berjudul "CIA Activities in Chile", mengungkapkan bahwa CIA secara aktif mendukung junta militer setelah penggulingan Allende, dan banyak petugas militer Pinochet yang menjadi tentara bayaran CIA atau militer AS, bahkan ada beberapa yang diketahui terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.³⁰ Chili dibawah pemerintahan Pinochet melakukan kebijakan ekonomi yang berlawanan dengan apa yang telah diprogramkan oleh Allende. Pasar tenaga kerja dibebaskan dari hambatan-hambatan regulasi

²⁸ Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, seorang Komandan Angkatan Darat Chili di masa pemerintahan Salvador Allende. Kemudian menjadi kepala junta militer yang berkuasa di Chili pada periode 1973 – 1990 setelah berhasil meraih kekuasaan dengan cara kudeta sesaat setelah pemilu demokratis yang memilih Presiden Salvador Allende yang sosialis. Pinochet menjabat sebagai presiden Republik pada 1974 - 1990 (dari 1981 hingga terbentuknya sebuah Konstitusi 1980) yang baru, dalam CBCNews, *Augusto Pinochet: Timeline*, diakses dari <http://www.cbc.ca/news/background/chile/pinochet.html> pada 1 Juli 2013

²⁹ David Harvey, *Neoliberalisme.., Op. Cit.*, hlm. 14

³⁰ Peter Kornbluh, *CIA Acknowledges Ties to Pinochet's Repression: Report to Congress Reveals U.S. Accountability in Chile*. Chile Documentation Project. National Security Archive, 2000, diakses dari <http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20000919/>, pada 1 Juli 2013.

institusional. Kebijakan substitusi impor dan proteksi tarif demi memajukan industri nasional yang sebelumnya menjadi program dominan di beberapa negara Amerika Latin dianggap gagal. Kebijakan tersebut tidak pernah berjalan baik di Chili.

Keterpurukan ekonomi memaksa Chili untuk memikirkan pendekatan baru yang menjadi jalan keluar lebih cepat dalam memulihkan ekonomi mereka. Sekelompok ekonom '*Chicago Boys*' yakni Milton Friedman dan beberapa koleganya dengan teori neoliberalnya diajak untuk turut serta memulihkan kembali perekonomian Chili. Pinochet membawa para ekonom neoliberal tersebut ke dalam pemerintahan dengan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan, langkah awalnya adalah melakukan negosiasi hutang dengan IMF. Para ekonom tersebut melakukan restrukturisasi ekonomi yang sesuai dengan paham ekonomi neoliberal,

- a. Membatalkan proses nasionalisasi dan melakukan privatisasi atas aset-aset publik.
- b. Memperbolehkan sumber-sumber daya alam (perikanan, hutan, air, dsb) untuk dieksploitasi oleh swasta tanpa harus mengikuti regulasi. Bahkan sering kali terjadi pengusuran secara paksa terhadap hak-hak milik pribumi.
- c. Melakukan privatisasi atas jaminan sosial.
- d. Memberi kemudahan bagi masuknya arus investasi langsung oleh asing
- e. Membuka pasar Chili untuk perdagangan global dan diciptakannya perdagangan yang lebih bebas.

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut, aktivitas perusahaan asing di Chili mendapat perlindungan penuh dari negara sehingga kesempatan untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya pun terbuka lebar. Kebijakan ini menghasilkan apa yang telah disebut sebagai " *Miracle of Chile*", tapi kritikus mengklaim kebijakan pemerintah secara dramatis meningkatkan kesenjangan ekonomi.³¹

Keajaiban yang terjadi di Chili setelah diterapkannya ekonomi neoliberal di negara itu semakin meyakinkan para ekonom seperti Hayek dan Friedman. Resep neoliberalisme mereka mulai dirasakan khasiatnya sebagai tawaran positif. Pada awalnya kita melihat itu sebagai kejayaan. Problematika ekonomi belum pada puncaknya, untuk seterusnya penulis mengajak untuk kemudian melihat apakah hal ini akan bertahan lama?

Kendali negara atas sumber daya alam dibatasi oleh regulasi yang diterapkan ekonomi neoliberal. Namun meskipun demikian negara masih mempunyai kendali atas sektor sumber daya alam penting di Chili yakni Tembaga (merupakan satu-satunya SDA yang dikuasai negara).³² Oleh negara sektor ini dianggap vital dan bernilai penting bagi kesehatan anggaran negara karena anggaran pendapatan dari tembaga bisa masuk sepenuhnya ke dalam kas negara. Dalam perjalanannya, neoliberal akhirnya menemu titik ajalnya di Chili dengan adanya krisis sistemik di

³¹ Alan Angell, *The Cambridge History of Latin America*, Cambridge University Press, New York , 1991, hal. 318 diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet#cite_note-return-3, pada 1 Juli 2013.

³² David Harvey, *Neoliberalisme.., Op. Cit.*, hlm 16.

Amerika Latin. Revivalisasi ekonomi Chili, akumulasi kapital, dan tingkat kembalian investasi asing yang tinggi tidak bertahan lama. Kebijakan tersebut dianggap gagal dengan adanya krisis hutang Amerika Latin pada tahun 1982.

Chili bukan satu-satunya negara yang menjadi tempat eksperimen paham ekonomi neoliberalisme di dunia. Pada tahun 1979 dan 1980, Margaret Thatcher di Inggris dan Ronald Reagan di Amerika Serikat menjadi pelopor bagi paham aliran neoliberalisme di barat. Mereka disebut sebagai politikus aliran 'Kanan Baru' yang dengan antusias memperjuangkan pasar bebas dan menolak paham Keynesian. Thatcher dan Reagan memilih untuk mengikuti paham ekonomi yang dibawakan Milton Friedman dan Hayek. Meskipun ekonom-ekonom ini mengakui bahwa pasar telah gagal, tetapi di sisi lain mereka meyakini bahwa pasar bebas mampu mengalokasikan barang dan jasa secara lebih efektif dibandingkan negara, dan bahwa usaha-usaha negara dalam memerangi pasar lebih mendatangkan kerugian dibandingkan keuntungan.³³ Kedua politikus ini kemudian menjadikan gagasan kebijakan mereka menjadi sebuah aliran ideologi neoliberalisme dengan credo Thatcherisme dan Reaganisme. Meskipun keduanya berada dalam satu pijakan yang sama yakni neoliberalisme, namun tujuan maupun prioritas kedua tokoh ini sering kali berbeda. Thatcher memakai moneterisme, yang menekankan kontrol ketat atas *money supply*, sedangkan Reagan lebih fokus menganut *supply-side*, yang menyarankan pemotongan pajakguna memberikan insentif sebesar-besarnya bagi

³³ Norena Hertz, *Hidup di Dunia Material: Munculnya Gelombang Neoliberalisme*, dalam I. Wibowo, Francis Wahono (ed.), *Op.Cit.*, hlm. 20.

produksi. Meskipun begitu, keduanya tetap sepakat bahwa negara harus kembali ke fungsi dasarnya dengan cara melakukan privatisasi atau mengkontrakkan sejumlah fungsi negara kepada swasta.

Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri Inggris dalam kebijakan ekonominya dipengaruhi oleh Keith Joseph seorang publisistis dan polemikus yang sangat aktif dan mempunyai hubungan kuat dengan Institute of Economic Affairs yang neoliberal. Keith Joseph juga merupakan pengikut Hayek, diangkat sebagai Menteri Perindustrian dan kemudian menjadi Menteri Pendidikan. Thatcher menolak keynesian dan menganggap solusi-solusi penawaran monetaris merupakan hal yang fundamental untuk menyembuhkan stagflasi yang telah mencengkrum ekonomi Inggris sejak tahun 1970-an. Dalam praktik kebijakannya Thatcher melakukan beberapa hal³⁴,

- a. Konfrontasi dengan serikat buruh.
- b. Menghancurkan segala bentuk solidaritas sosial yang bisa menghambat fleksibilitas kompetisi.
- c. Meninggalkan komitmen-komitmen negara kesejahteraan.
- d. Privatisasi perusahaan-perusahaan publik.
- e. Pengurangan pajak terhadap pengusaha swasta.
- f. Mendorong prakarsa entrepreneurial.

³⁴ David Harvey, *Neoliberalisme...Op. Cit.*, hlm. 37-38

- g. Menciptakan suatu iklim bisnis yang menguntungkan dalam rangka untuk menarik arus masuk investasi secara besar-besaran.

Ronald Reagan di Amerika Serikat pun melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Margaret Thatcher di Inggris. Reagan secara politik mendukung langkah-langkah deregulasi lebih jauh, melakukan pemotongan pajak, pemotongan anggaran dan membatasi kekuatan serikat buruh dan profesi.³⁵ Bahkan Reagan melakukan penunjukkan langsung terhadap pejabat-pejabat publik yang mengurus bidang kesehatan, lingkungan, dan keamanan kerja dengan maksud untuk menghancurkan konsep negara kesejahteraan. Reagan menunjuk David Stockman, seorang penganut Hayek, untuk mengepalai OMB (the Office of Management and Budget), jabatan setingkat menteri. Deregulasi dilakukan dalam berbagai bidang produksi dalam negeri baik itu perusahaan penerbangan dan komunikasi sampai dengan keuangan, memberi jalan bagi kepentingan-kepentingan korporasi yang berkuasa untuk masuk ke zona-zona pasar bebas yang baru secara tanpa hambatan. Kebijakan pelonggaran tarif pajak atas investasi memudahkan kapital untuk berpindah dari wilayah-wilayah timur laut dan *midwest* Amerika yang merupakan daerah-daerah dengan gerakan serikat buruh yang kuat ke wilayah selatan dan barat Amerika yang merupakan wilayah yang tidak memiliki serikat buruh dan lemah regulasinya. Arus modal keuangan difokuskan ke luar negeri agar bisa mendapatkan

³⁵ *Ibid*, hlm. 41.

tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi. Perpindahan produksi dalam negeri ke luar negeri menjadi fenomena umum yang terjadi selama itu.

Menurut aliran kanan baru, persoalan kesejahteraan tidak lagi menjadi fokus penting Negara dalam kebijakan ekonominya. Mentalitas kesejahteraan hanya akan melahirkan kelambanan dan ketergantungan. Aliran kanan baru menolak semangat egalitarian dan mengganti interdependensi menjadi kemandirian Negara, serta standar kemiskinan relative menjadi tidak relevan. Kemiskinan didefinisikan berdasarkan standar kebutuhan yang mutlak. Sebagaimana yang dinyatakan Thatcher pada tahun 1985: "Anda tidak akan bersalah kepada orang miskin ketika anda setuju bahwa orang-orang kalangan atas mendapatkan upah yang lebih baik".³⁶ Pandangan Thatcher ini kemudian yang menjadi motivasi bagi kaum-kaum pekerja di Inggris. Beban kesejahteraan beralih menjadi tanggung jawab individu yang harus dilakukan dan diusahakan dengan kerja keras. Revolusi industri di Inggris bisa dikatakan menuju babak baru dalam sebuah kejayaan dengan kemerdekaan partisipatif individu yang mencoba berkreasi dan bekerja keras.

Kapitalisme ala Thatcherisme dan Reaganomics ini menjadi pemicu utama atas penyebaran neoliberalisme di beberapa Negara di dunia. Kemajuan di bidang ilmu teknologi, media dan komunikasi menjadi jalur utama mereka untuk menyebarkan paham ini. Melalui institusi-institusi neoliberal yang kemudian disebut sebagai rezim *Bretton Woods* yang terdiri dari IMF, WTO, dan World Bank, paham

³⁶ Norena Hertz, *Hidup...Op. Cit.*, hlm. 24

neoliberalisme hadir sebagai bentuk regulasi ekonomi bagi negara-negara di dunia. Negara-negara di dunia mulai terkena euforia kapitalisme global dalam wujud neoliberalisme mulai tahun 1980-an dan tahun 1990-an. Kapitalisme mulai merambah wilayah-wilayah di Amerika Latin, Asia Timur, India, dan hampir seluruh negara-negara di Afrika.³⁷

Di Australia pada tahun 1980-an dibawah kepemimpinan perdana menteri Paul Keating beresiko mengalami krisis ekonomi yang dahsyat jika tidak segera melakukan reformasi ekonomi. Paul Keating mengadopsi gaya ekonomi yang mirip dengan Thatcherisme, dengan melakukan kebijakan deregulasi, kebijakan fiskal yang tepat, dan privatisasi. Di Kanada, Brian Mulroney melakukan terobosan dengan melancarkan liberalisasi hukum yang membatasi investasi asing di negara tersebut, menjadikan pasar Kanada lebih bebas. Bahkan New Zealand yang dikenal sebagai negara yang mengedapankan demokrasi sosial beralih menjadi negara neoliberal.

Arus besar neoliberalisme pun merambat ke beberapa negara di Amerika Latin. Chili di bawah kepemimpinan Jendral Pinochet dengan bantuan ahli ekonom dari Chicago mengubah kiblat ekonominya ke arah neoliberal. Pada awal tahun 1990-an, hampir seluruh pimpinan negara di Amerika Latin diantaranya Presiden Carlos Salinas de Gortari di Meksiko, Presiden Carlos Menem di Argentina, dan Presiden Fernando Collor de Mello di Brasil mulai menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, membuka kesempatan akan persaingan pasar, dan keterbukaan terhadap arus investasi

³⁷ *Ibid*, hlm. 26

ekonomi dunia. Beralihnya para negara Amerika Latin ke arah neoliberal lebih disebabkan oleh kegagalan praktik ekonomi kapital mereka terdahulu yang cenderung intervensionis terhadap ekonomi pasar. Keterpurukan ekonomi yang dialami membuat mereka melakukan penyelamatan melalui pinjaman maupun bantuan dana dari IMF dengan syarat harus menerapkan paket-paket reformasi yang sesuai dengan "*Washington Consensus*".

Di Eropa, pemerintah negara-negara Eropa berusaha memikirkan kembali wujud kebijakan ekonomi yang harus dilakukan mengingat tingginya inflasi dan hutang piutang yang terjadi saat itu. Langkah bijak yang dilakukan oleh Jerman dan Prancis dengan mencoba resep neoliberalisme dalam rangka penyelamatan ekonomi negara. Helmut Kohl di Jerman dan Jacques Chirac di Prancis bukanlah pengikut fanatik aliran Kanan Baru seperti halnya Thatcher dan Reagan, namun mereka mengakui keuntungan finansial dari kebijakan privatisasi.³⁸ Kedua pimpinan negara tersebut mencoba beradaptasi dengan iklim global yang cenderung neoliberal dengan mengeluarkan kebijakan penurunan pajak usaha dan melakukan deregulasi pasar tenaga kerja. Kebijakan Kohl di Jerman lebih menguntungkan para bos perusahaan dengan melakukan swastanisasi perusahaan publik, pajak usaha diturunkan, hukum yang cenderung memihak para pemilik usaha, dan pembatasan layanan sosial dan kesehatan. Di Italia dan Prancis, perusahaan-perusahaan senilai kurang lebih \$50 juta

³⁸ *Ibid*, hlm. 27

secara keseluruhan, diswastanisasi dalam kurun waktu sepuluh tahun hingga 1995,³⁹ yang pada akhirnya melahirkan pengusaha-pengusaha besar.

Kegagalan komunisme gaya Uni Soviet pun telah menjadi cukup alasan bagi beberapa negara pengikutnya untuk segera meninggalkan gaya lama dan mulai beralih ke neoliberalisme. India yang lebih banyak melakukan hubungan dagang dengan negara komunis mulai menyadari pentingnya melakukan liberalisasi ekonomi, dengan menerapkan kebijakan privatisasi dan pelonggaran investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Setelah tahun 1989, Zambia dan Tanzania di kawasan Afrika pun mulai mengarah pada kebijakan liberalisasi pasar. Bahkan Cina yang notabene menganut paham komunis mulai menyadari bahwa negara mereka tertinggal di belakang negara-negara kapitalis Asia dan menyalahkan perencanaan terpusat sosialis sebagai faktor keterbelakangan dan kemiskinan. Kesuksesan macan-macan ekonomi Asia seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan dan negara berkembang lainnya secara bertahap mulai mengutarakan niatnya untuk membuka pasar domestik dan mempraktikkan doktrin kapitalisme pasar bebas.

Paham neoliberalisme telah mendikte kesejahteraan ekonomi dan keamanan fisik manusia melalui tangan-tangan para investor keuangan internasional dan perusahaan multinasional. Telah terjadi laju pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran material tidak hanya di negara industri maju, termasuk juga negara-negara dunia

³⁹ Edward Carr, *Survey of Business in Europe: What The Ministry Managed?*, The Economist, 1996 dikutip dalam *Ibid*, hlm. 27

ketiga. Di Inggris, proporsi penduduk yang memiliki tempat tinggal sendiri telah mengalami peningkatan dari sekitar separo pada tahun 1980 menjadi dua pertiga pada akhir kepemimpinan Thatcher.⁴⁰ Enam puluh persen populasi dikategorikan sebagai golongan kelas menengah, angka pengangguran berada pada tingkat terendah sejak tahun 1980, dan inflasi jauh lebih rendah dibandingkan di awal tahun 1970-an. Semenjak tahun 1992 Selandia baru mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4 % per tahun dan angka pengangguran berkurang hampir separuh, hanya mencapai angka 6 %.⁴¹ Australia pun menikmati satu tingkat pertumbuhan tertinggi yang dialami oleh negara-negara maju. Chili mengalami pertumbuhan sebesar 7 % per tahun selama satu dekade, sejak tahun 1988 hingga 1998.⁴² Amerika Serikat mengalami penurunan tingkat pengangguran pada titik terendah sepanjang 30 tahun sekaligus *surplus* anggaran untuk pertama kalinya selama 42 tahun. Amerika menjadi penyandang gelarsebagai bangsa pedagang saham sehari (*daytrades*), makin banyak rumah tangga yang berjudi dengan *surplus* uangnya, menggantungkan diri pada arus pasar saham yang diyakini akan terus berkembang.

Fenomena yang sama terjadi di beberapa negara berkembang yang telah membuka diri terhadap prinsip pasar bebas. Singapura di bawah rejim otoritarian mencapai angka pengangguran yang sangat rendah dengan tingkat pertumbuhan GNP dan GDP satu digit lebih tinggi, memiliki angkatan kerja berketrampilan tinggi,

⁴⁰ Peter Riddell, *The Thatcher Era and Its Legacy*, 1991, hal 6, dikutip dalam *Ibid*, hlm. 27

⁴¹ *Kiwis Turn Sour*, *The Economist* (19 Oktober 1996), dikutip dalam *Ibid*, hlm. 40

⁴² *Latin America and The Market: The Free Societyon Trial*, *The Economist* (21 November 1998), dikutip dalam *Ibid*, hlm. 40

angka melek huruf 91 % dan mempunyai tingkat pendapatan per kapita kedua tertinggi setelah Jepang di kawasan Asia. Thailand mengalami pertumbuhan tingkat GDP per kapita sebesar tiga kali lipat semenjak tahun 1975.⁴³ Di India sedang mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi dari sisi penjualan otomotif dengan angka penjualan yang melonjak hingga 57 % pada tahun 2000, dan pengembangan *software* yang mencapai laba penjualan hingga \$4 juta di tahun yang sama. Perusahaan multinasional di Meksiko telah berperan aktif dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lebih dari setengah juta pekerjaan baru. Keadaan ini memberikan keuntungan lebih bai serta upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lokal. Reformasi pasar bebas di Cina telah berhasil melipatgandakan produksi biji-bijian dalam jangka waktu 5 tahun. Selain itu, investasi asing juga memberikan kesempatan pelatihan, memperbaiki fasilitas-fasilitas lokal dan telah menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Pertumbuhan ekonomi di dunia yang terjadi pada sekitaran abad 20 menjadi fenomena menarik ketika umat manusia dihadapkan pada sebuah kejayaan ideologi barat dalam hal ekonomi politik. Kepercayaan dunia pada ideologi neoliberalisme semakin tinggi mengingat banyak negara-negara mulai merasakan keuntungan yang diperoleh. Dunia dengan segala rasa hormatnya pada saat itu melakukan liberalisasi besar-besaran, akibatnya kedaulatan negara secara tidak langsung merestui barat

⁴³ Paul Krugman, *Some Don't Want to Be Saved From Globalization*, International Herald Tribune (17 Februari 2000) dikutip dalam *Ibid*, hlm. 41

untuk mengeksplorasi sumber daya yang ada, tentu saja melalui program neoliberal, baik itu privatisasi, deregulasi dan pasar bebas.

Negara-negara kapitalis dalam perjalanannya menjatuhkan pilihan kepada neoliberalisme setelah melalui beberapa pertimbangan dan eksperimen yang telah terjadi di beberapa negara. Resep penyebaran gagasan neoliberalisme lahir pada tahun 1989 yang disebut sebagai '*Washington Consensus*'. *Washington Consensus* menjadi istilah yang dipopulerkan oleh John Williamson, yang dihipunkan dalam 10 poin kebijakan. Kebijakan ini pada awalnya menjadi sebuah tawaran solusi dari Amerika Serikat terhadap krisis yang terjadi di Amerika Latin.⁴⁴ Program-program ini kemudian menjadi resep andalan bagi rejim neoliberal sebagai langkah alternatif kepada negara-negara berkembang untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sepuluh rekomendasi ekonomi yang terkenal dengan Konsensus Washington itu adalah:⁴⁵

- 1) Disiplin fiskal dan pengekangan defisit anggaran
- 2) Pengurangan belanja publik, khususnya militer dan administrasi publik.
- 3) Reformasi pajak dengan memberi kelonggaran kepada pengusaha untuk kemudahan membayar pajak
- 4) Liberalisasi finansial berupakebijakan bunga bank oleh mekanisme pasar
- 5) Usaha untuk membuat nilai tukar uang yang lebih kompetitif
- 6) Liberalisasi hambatan-hambatan perdagangan

⁴⁴ John Williamson, *What Washington Means by Policy Reform*, diakses dari <http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?researchid=486>, pada tanggal 5 Juli 2013

⁴⁵ Budi Winarno, *Melawan... Op. Cit.*, hlm. 12

- 7) Menggiatkan *Foreign Direct Investment*
- 8) Privatisasi atas perusahaan-perusahaan negara
- 9) Deregulasi peraturan sehingga lebih terbuka dengan pasar
- 10) Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Konsensus Washington ini menjadi resep menarik bagi institusi *Bretton Woods* yang didukung penuh oleh Amerika Serikat untuk memuluskan kebijakan luar negerinya. Padahal maksud awal dari Konsensus Washington ini adalah:

“untuk menghancurkan seluruh rintangan nasional terhadap perdagangan, mengakhiri proteksionisme, memperluas pasar dan zona bebas, dan memungkinkan mengalirnya modal kemana saja dengan kendala dan regulasi minimal”⁴⁶

Konsensus Washington bisa dikatakan menjadi ‘diktat’ terbaik dari segala rumusan neoliberalisme yang berusaha menjamurkan ideologi tersebut dalam bentuk kesepakatan dan kesepahaman antar negara-negara. Melalui konsensus Washington, neoliberalisme hadir sebagai satu-satunya jalan keluar yang didukung bersama-sama oleh lembaga-lembaga ekonomi barat dengan sokongan kekuatan negara-negara tersebut. Bahkan penulis memandang Konsensus Washington tidak lebih dari sebuah upaya negara-negara barat untuk terus melakukan kolonialisme pasif yang sifatnya mengeruk dan mengeksplorasi sumber daya negara-negara berkembang.

⁴⁶ Jim Garrison, *America as Empire: Global Leader or Rogue Power?*, BK Publisher, San Fransisco, 2004 dikutip dari M. Amien Rais, *Agenda... Op. Cit.*, hlm. 16

C. Penetrasi Neoliberalisme ke Indonesia

Neoliberalisme di Indonesia bukanlah barang baru di Indonesia. Sempat menjadi cibiran dalam pemerintahan SBY di Indonesia. Penulis merasa sekiranya perlu untuk mendeskripsikan perjalanan neoliberalisme memasuki wilayah domestik negara dan kaitannya dengan arah kebijakan luar negeri. Penulis akan sedikit memaparkan masuknya neoliberalisme sebagai ideologi ekonomi politik yang mendominasi Indonesia dalam bingkai perjalanan historis. Tidak sebagai ideologi yang ada saat ini di era SBY.

Indonesia masuk dalam kubangan neoliberalisme sejak pertengahan 1960-an, bersamaan dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan tahun 1967. Namun, agenda neoliberalisme berjalan efektif sejak pertengahan 1980-an. Diantara agenda IMF di Indonesia adalah; pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi dalam berbagai bentuknya, pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan dan privatisasi BUMN. Masuknya IMF ke Indonesia merupakan bom waktu yang suatu saat meledak. Pasalnya, Indonesia sebagai anggota IMF mau tidak mau mengikuti segala kebijakan IMF yang justru pada akhirnya menghancurkan perekonomian Indonesia.

Puncak berlangsungnya agenda IMF adalah tahun 1997-1998 sewaktu krisis moneter menerjang Indonesia. Kemerosotan nilai rupiah dari Rp 2500 menjadi 16.000 per satu dollar AS pada awal 1998 memaksa pemerintah Indonesia

mengundang campur tangan IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai prasyarat untuk mencairkan pinjaman siaga (Standby Loan) yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan agenda kapitalisme neoliberal melalui penandatanganan Letter Of Intent (LOI).

Krisis ekonomi dan percepatan pembangunan yang ingin segera dituntaskan Soeharto di masa kepemimpinannya menjadi urgensi yang harus segera diselesaikan. Penerapan konsep pembangunan ekonomi dimulai sejak tahun 1969 oleh Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang menyusun cetak biru pembangunan ekonomi Indonesia dengan sebutan Rencana Pembangunan Lima Tahun, I, II, III, dan IV. Repelita menjadi fokus kebijakan Soeharto baik itu di tingkatan domestik dan internasional.

Di awal 1990-an, Indonesia sangat menggalakkan investasi asing dan swasta untuk menggenjot pertumbuhan. Akibatnya hutang luar negeri swasta Indonesia membengkak dari US\$ 1,8 miliar pada tahun 1975 menjadi US\$ 18,8 pada 1990. Tujuh tahun kemudian hutang luar negeri swasta Indonesia membengkak 4,5 kali lipat menjadi US\$ 82,2 miliar. Beban hutang yang sangat besar inilah yang membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap krisis dan meledak pada pertengahan 1997.⁴⁷

⁴⁷ Hidayatullah Muttaqin, *Jejak Neoliberalisme di Indonesia*, diakses dari <http://www.jurnal-ekonomi.org/jejak-neoliberalisme-di-indonesia/>, pada tanggal 31 Agustus 2013

Sementara itu tekanan beban hutang Orba mendorong pemerintah melakukan privatisasi sejumlah BUMN di pasar modal Indonesia dan internasional sejak tahun 1991 hingga 1997. Dana hasil privatisasi pada periode tersebut sebagian digunakan untuk membayar cicilan hutang pemerintah.

Kebijakan neoliberal di Indonesia semakin tidak terkendali dengan masuknya IMF dalam penataan ekonomi sejak akhir 1997. Melalui kontrol yang sangat ketat, IMF memaksa Indonesia menjalankan kebijakan neoliberal, termasuk menalangi hutang swasta melalui BLBI dan merekapitalisasi sistem perbankan nasional yang tengah ambruk dengan biaya Rp 650 trilyun. Momen ini juga dimanfaatkan Bank Dunia, ADB, USAID, dan OECD untuk meliberalisasi ekonomi Indonesia melalui program pinjaman yang mereka berikan. Pemerintahan neoliberal di Indonesia berlangsung menjelang akhir kekuasaan Orde Baru hingga saat ini. Sepanjang itu, pemerintahan neoliberal mengukir prestasi meningkatkan hutang negara dua kali lipat dalam waktu 10 tahun dari US\$ 67,3 miliar menjadi US\$ 65,7 miliar untuk hutang bilateral/multilateral dan Rp 972,2 trilyun dalam bentuk hutang obligasi. Karenanya, pemerintahan Soerharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY-JK menjadi bagian tidak terpisahkan dari penerapan kebijakan ekonomi neoliberal. Oleh karenanya akan menjadi hal yang aneh dalam pandangan Muttaqien jikalau SBY-Boediono tidak menerapkan kebijakan neoliberal.

Ishak Rafick secara detail menggambarkan bagaimana neoliberalisme ini bertransformasi pada masing-masing rejim pemerintahan di Indonesia melalui

bukunya "*Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, Dan Jalan Baru Membangun Indonesia*". Pasca Soeharto lengser, Habibie naik tahta. Ia bangga karena mendapat utang luar negeri (ULN) baru. Baginya, itu membuktikan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap pemerintahnya. Rafick mencatat, Habibie lupa, sebenarnya ULNlah yang menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis. Banyak analisis menyimpulkan, krisis terjadi karena Indonesia terjebak kondisi *Fisher Paradox*, yaitu situasi di mana makin Indonesia melunasi pembayaran ULN beserta cicilan bunganya, makin banyak ULNnya. Sebab, untuk membayar ULN serta cicilannya, dibutuhkan ULN baru. Implikasinya, Indonesia terjebak perangkap ULN (debt trap). Tragisnya, ULN diandalkan Habibie guna mengangkat negara dari keterpurukan. Habibie berhasil menegakkan landasan untuk demokratisasi sebagai respon terhadap tuntutan mahasiswa dan rakyat sebelum dan saat reformasi itu terjadi. Di sisi lain Habibie melaksanakan banyak permintaan IMF dalam bentuk berbagai Letter of Intent terutama dalam kaitannya dengan rekapitalisasi perbankan, BLBI & MSA.

Gus Dur adalah Presiden yang punya visi politik internasional. Manuver diplomatiknya patut dipuji. Ia tahu bagaimana memahalkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi. Agar tak melulu diremehkan AS, ia menggagas pembentukan poros Jakarta-Beijing-New Delhi. Ini menegaskan, Indonesia punya alternatif selain Barat. Tak hanya itu, ia bermaksud membuka hubungan dagang dengan Israel. Pertimbangannya, karena komunitas Yahudi menguasai Kongres/Senat AS, media

massa dan lembaga keuangan internasional, ia ingin menembus akses ke komunitas Yahudi via Israel. Sayang, langkahnya menuai resistensi di dalam negeri. Ia akhirnya dijatuhkan akibat Bulog Gate dan Brunei Gate.

Tak seperti Gus Dur yang ditekan IMF karena enggan menjual aset bangsa, Presiden Megawati justru diperlakukan lunak oleh IMF. Bantuan IMF mengalir mudah ke Mega. Imbalannya, Mega diharuskan menjual aset negara. Maka, satu per satu aset negara berpindah ke pihak asing. Di tangan Mega, tulis Rafick, liberalisasi ekonomi berjalan tanpa batas. Akibatnya, kendati dipuji IMF, Mega akhirnya digulingkan rakyat melalui Pemilu yang memilih SBY sebagai Presiden.

Dengan cakupan bahasan ekonomi dalam pembangunan Indonesia maka penulis hanya memfokuskan pada beberapa poin penting yang ada kaitannya dengan masuknya Neoliberalisme ke Indonesia.

1. Peran Mafia Berkeley

Revrisond Baswir dalam bukunya 'Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia' menyatakan bahwa istilah Mafia Berkeley diperuntukkan untuk sekelompok ekonom Indonesia yang dibina oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi pasar neoliberal. Para ekonomi ini merupakan lulusan Universitas Kalifornia di Berkeley, Amerika

Serikat.⁴⁸ Sepak terjang mereka di Indonesia dibuktikan dengan beberapa macam capaian keberhasilan di bidang ekonomi sesuai resep neoliberalisme yang dianut. Berawal dari proses penyelamatan perekonomian Indonesia di era Soeharto yang mengalami krisis ekonomi yang diwariskan oleh pemerintah Soekarno. Dengan bantuan IMF, mereka berhasil menekan inflasi dari sekitar 600 % pada tahun 1966 menjadi di bawah 10 % pada tahun 1969. Mereka juga berhasil membekukan pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, menggalang pembuatan utang luar negeri baru, dan menggenjot masuknya investasi asing secara besar-besaran.⁴⁹

Hal ini menjadi *start* yang baik bagi neoliberalisme untuk memulai karir ekonomi politiknya di Indonesia. Ibarat tamu, neoliberalisme dengan capaian awalnya itu dihidangkan dengan berbagai macam program yang istimewa. Sebuah temuan menarik oleh Kwik Kian Gie selaku pengamat ekonomi Indonesia yang menaruh kecurigaan konspirasi antara Mafia Berkeley di Indonesia dengan pihak pemerintah Amerika Serikat. Dia mengutip Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul "*Power in Motion*" dan Brad Simpson dalam disertasinya mempelajari dokumen-dokumen tentang hubungan Indonesia dan dunia Barat yang baru saja menjadi tidak rahasia, karena masa kerahasiaannya menjadi kadaluwarsa. Berikut temuan-temuan Kwik Kian Gie, dalam *Power in Motion*, halaman 37:

⁴⁸ Revrisond Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 17

⁴⁹ *Ibid*, hal. 17-18

"Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya 'hadiah terbesar', hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil-alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut "ekonom-ekonom Indonesia yang top".⁵⁰

"Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan 'the Berkeley Mafia', karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : buruh murah yang melimpah....cadangan besar dari sumber daya alam pasar yang besar."⁵¹

Bisa dilihat adanya peran sentral yang dilakukan oleh pihak asing dalam hal ini swasta memiliki keterkaitan dalam hal merumuskan kebijakan ekonomi neoliberal di Indonesia. Pada awal masuknya di Indonesia, para ekonom yang termasuk dalam Mafia Berkeley telah mempunyai resep neoliberalisme yang tepat dari para pengusaha swasta yang terlibat dari pertemuan tersebut. Dengan membuka pasar domestik Indonesia ke arah privatisasi dan adanya arus investasi asing dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia serta percepatan pembangunan. Seolah menjajakan

⁵⁰ Kwik Kian Gie, *Pak Harto Salah Pilih Tim Ekonomi Dan Kebijakannya (Artikel 2)*, dalam <http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/pak-harto-salah-pilih-tim-ekonomi-dan-kebijakannya-artikel-2/>, diakses 30 Juli 2013

⁵¹ Kwik Kian Gie, *Pak Harto Salah Pilih Tim Ekonomi Dan Kebijakannya (Artikel 2)*, dalam <http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/pak-harto-salah-pilih-tim-ekonomi-dan-kebijakannya-artikel-2/>, diakses 30 Juli 2013

kedaulatan negeri Indonesia kepada asing, mereka menjanjikan adanya tenaga kerja murah, sumber daya alam yang banyak (untuk siap dieksplorasi besar-besaran), dan Indonesia yang juga sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia menjadi pangsa pasar yang menjanjikan.

Di halaman 39 ditulis :

"Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. 'Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler' kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konperensi. 'Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri."⁵²

Dari bukti kutipan-kutipan di Indonesia, Mafia Berkeley memiliki peran penting dalam proses legitimasi neoliberalisme sebagai ideologi ideal bagi keterpurukan ekonomi di Indonesia. Rakyat Indonesia boleh berbangga dengan kontribusi mereka dalam sukseki kemajuan ekonomi Indonesia tapi bukan berarti harus melupakan

⁵² Kwik Kian Gie, *Pak Harto Salah Pilih Tim Ekonomi Dan Kebijakannya (Artikel 2)*, dalam <http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/pak-harto-salah-pilih-tim-ekonomi-dan-kebijakannya-artikel-2/>, diakses 30 Juli 2013

perhatian dari apa yang mereka lakukan. Arus investasi dan privatisasi perusahaan milik negara telah menjadi bukti kongkrit peran aktif dari para ekonom mafia berkeley. Telah terjadi proses pengkaplingan sumber daya alam Indonesia untuk dikelola oleh swasta asing. Semua ini dilakukan atas nama pembangunan dan pemulihan ekonomi. Berikut penulis memberikan satu bukti lagi masih dari sumber yang sama dipaparkan oleh Kwik Kian Gie,

Di halaman 39 ditulis :

"Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia."⁵³

Telah terbukti bahwa peran para aktor ekonomi Mafia Berkeley ini telah menggadaikan kedaulatan bangsa Indonesia. Hal ini mengingatkan kita, terhadap Mazhab Chicago yang juga melakukan hala yang sama di Chili dengan segala ketentuan neoliberalisme.

⁵³ Kwik Kian Gie, *Pak Harto Salah Pilih Tim Ekonomi Dan Kebijakannya (Artikel 2)*, dalam <http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/pak-harto-salah-pilih-tim-ekonomi-dan-kebijakannya-artikel-2/>, diakses 30 Juli 2013

Di era Soeharto, para ekonom Berkeley ini beranggotakan sebagai berikut:

- 1) Widjojo Nitisastro: Kepala BAPPENAS (1967–1983), Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Perindustrian (1973–1983), Penasihat BAPPENAS (1983–1998), Penasihat ekonomi Presiden (1993–1998), Ketua Tim Asistensi Ekonomi (1999–2001)
- 2) Ali Wardhana: Menteri Keuangan (1973–1983), Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Perindustrian (1983–1988)
- 3) Mohammad Sadli: Menteri Pertambangan di Kabinet Pembangunan II
- 4) Subroto: Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (1973–1978), Menteri Pertambangan dan Energi (1978–1988)
- 5) Emil Salim: Wakil Ketua BAPPENAS (1967–1971), Menteri Aparatur Negara (1971–1973), Menteri Perhubungan, Komunikasi, dan Pariwisata (1973–1978), Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1978–1983), Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1983–1993)

Selain tokoh-tokoh itu ada juga pengikut lainnya. Mereka bukan lulusan Berkeley. Misalnya kelompok 'RMS' : Radius Prawiro, Adrianus Moy dan JB

Sumarlin ditambah Saleh Affif dan Arifin Siregar. Namun, sekalipun jumlah mereka kecil, tetapi peran mereka dalam pemerintahan Soeharto, relatif sangat besar.⁵⁴

Para anggota kelompok ini tidak perlu harus pernah belajar di Universitas California di Berkeley. Faktor pengikatnya adalah ideologi dan kepercayaan yang sama. Garis kebijakannya dapat digambarkan sebagai *fundamentalisme mekanisme pasar dan kapitalisme partikelir*. Hal ini tentu saja sangat berkaitan erat dengan gagasan neoliberalisme.

Pada pergantian pemerintahan presiden di Indonesia Mafia Berkeley terus eksis di tampuk kekuasaan meskipun dengan generasi yang berbeda. Di era Habibie mereka masih dipercaya dalam merumuskan kebijakan ekonomi di Indonesia. Mereka berperan dalam berbagai aktivitas ekonomi untuk memuluskan bantuan IMF dan Bank Dunia di Indonesia. Namun, di era Presiden Abdurrahman Wahid para ekonom ini tergesur. Jabatan vital di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan diduduki oleh orang-orang perwakilan dari partai politik. PDI-P menempati posisi Menko Perekonomian dan Menteri Negara BUMN, PAN menduduki Menteri Keuangan, dan PPP mendapat jatah sebagai Menteri Negara Koperasi dan Pengembangan UKM.⁵⁵ Di era kepemimpinan Presiden Megawati, para ekonom Berkeley ini kembali hadir dalam lingkaran kekuasaan. Frans Seda yang lahir dari generasi pertama Mafia

⁵⁴ Derek Manangka, Plus-Minus Kabinet SBY Tanpa Mafia Berkeley, dalam <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1846171/plus-minus-kabinet-sby-tanpa-mafia-berkeley#.UfuA5NLwlqg>, diakses 1 Agustus 2013

⁵⁵ Revrison Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 24

Berkeley terpilih sebagai penasihat presiden. Sedangkan Dorodjatun Kuntjorojakti dan Budiono, yang berasal dari generasi kedua Mafia Berkeley menjabat sebagai Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan.⁵⁶

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pos-pos kekuasaan yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan, dikuasai oleh orang-orang partai politik. Meskipun demikian, mereka tetap melestarikan sistem ekonomi neoliberal sebagai acuan pengambilan kebijakan. Di era SBY ini juga terdapat anak-anak ideologis dari Mafia Berkeley, yakni

- 1) Sri Mulyani Indrawati⁵⁷ : Kepala BAPPENAS (2004-2005), Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia (2008-2009), Menteri Keuangan Indonesia (2010).
- 2) Boediono : Kepala BAPPENAS (1998-1999), Menteri Keuangan Republik Indonesia (2001-2004), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2005-2008), Wakil Presiden Indonesia (2009-2014)
- 3) Mari E. Pangestu: Menteri Negara Koperasi dan UKM Indonesia (2008-2009), Menteri Perdagangan Indonesia (2004-2011), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (2011)

⁵⁶ Revisond Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 24

⁵⁷ Sri Mulyani Indrawati mengenyam pendidikan ekonomi di Universitas yang ada di Amerika Serikat. Sejak pemerintahan Gus Dur dia telah terlibat dalam berbagai aktivitas neoliberalisme di Indonesia sejak menjadi bagian penting dalam Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan Emil Salim sebagai Ketua dan Sri Mulyani sebagai sekretarisnya.

- 4) Chatib Basri: Penasehat Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2006-2010), Sherpa Indonesia untuk G-20 (2008), Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 (2006-2010) dan Menteri Keuangan (2013)

Dalam sebuah tulisan Kwik Kian Gie mengatakan bahwa konon kabarnya, sebelum susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I terbentuk, SBY didatangi oleh Dubes AS Ralph Boyce dan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Andrew Steer. Mereka mengatakan bahwa kendali ekonomi hendaknya diberikan kepada SMI, Boediono dan Mari Pangestu.⁵⁸

Para aktor ekonom ini memang pada umumnya bukan lulusan Berkeley akan tetapi mereka memiliki kesamaan ideologi dengan pendahulu mereka. Bisa disebut sebagai 'Mafia Berkeley Reformasi'. Namun Kwik Kian Gie menyebut mereka dengan sebutan 'Organisasi Tanpa Bentuk'.

Mafia Berkeley dengan mazhab ekonomi neoliberalisme telah memasuki ruang-ruang kekuasaan di Indonesia dengan terus menjaga regenerasi di tiap pemerintahan. Mereka yang menjadi awal pembuka keran kapitalisme global untuk bisa mengintervensi ekonomi Indonesia. Selain itu, juga memberikan ruang bagi investor dan perusahaan asing untuk menguasai sektor-sektor sumber daya alam penting yang di Indonesia. Dengan mendewakan institusi-institusi *Bretton Woods*,

⁵⁸ Kwik Kian Gie, Sri Mulyani Indrawati (SMI) Berkeley Mafia Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) Imf Dan World Bank (WB), dalam <http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/sri-mulyani-indrawati-smi-berkeley-mafia-organisasi-tanpa-bentuk-otb-imf-dan-world-bank-wb/>, diakses 1 Agustus 2013

segala kebijakan ekonomi politik Indonesia bergerak di bidang makro ekonomi, dengan fokus pasar bebas, privatisasi, investasi dan deregulasi.

2. Peranan Institusi Neoliberal

Institusi neoliberal menjadi alat penting untuk memaksakan kehendak negara-negara barat penganut neoliberal untuk menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme ke hampir seluruh negara-negara di dunia, terutama negara berkembang. Institusi neoliberal ini hadir dalam berbagai model, baik itu organisasi maupun rezim internasional. Pada bahasan ini penulis tidak akan membahas identitas organisasi-organisasi internasional secara definitif namun lebih fokus pada sepak terjang mereka dalam pengambilan keputusan dalam negeri. Dari sekian banyak organisasi internasional, maka penulis hanya akan berfokus pada institusi neoliberal yang ada keterkaitan dengan Indonesia seperti rezim Bretton Woods (WTO, Bank Dunia, dan IMF), USAID, ADB. Lembaga-lembaga tersebut bisa dikatakan menjadi penentu kebijakan dalam negeri Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi hingga pada akhirnya berpengaruh pada politik luar negeri Indonesia.

Keberadaan institusi neoliberal di Indonesia tidak lepas dari adanya campur tangan para ekonom Mafia Berkeley. Seperti yang telah dipaparkan penulis di awal bahwa ekonom Berkeley ini yang membuka pintu masuk bagi institusi-institusi

neoliberal tersebut dengan misi perbaikan ekonomi dan percepatan pembangunan dengan resep neoliberalisme.

Institusi neoliberal ini masuk pada wilayah-wilayah strategis dalam hal pengambilan keputusan di Indonesia, contohnya mengajukan draft perundang-undangan untuk digunakan pemerintah Indonesia sebagai kebijakan konstitusional, loby, bantuan luar negeri, dan pinjaman. Masuknya neoliberalisme hampir disemua negara selalu dijamin oleh konstitusi negara tersebut, inilah yang disebut “Proyek *Rule of Law*”.

Alvaro Santos mencatat bahwa sampai 2006, Bank Dunia telah melaksanakan 330 proyek rule of law. Proyek rule of law dilaksanakan atas keyakinan Bank Dunia bahwa ekonomi pasar tidak mungkin terbentuk tanpa suatu pranata hukum yang pasti, efisien, dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (a predictable, efficient, and enforceable legal order). Alasan lainnya, proyek rule of law memungkinkan Bank Dunia/IMF masuk ke proses reformasi sistem hukum negara penerima bantuan, secara “apolitis” sesuai dengan mandat pendirian lembaganya. Padahal bisa jadi ada motivasi tertentu yang tersirat dari partisipasi pihak-pihak tersebut.⁵⁹

Bank Dunia dan IMF mengimplementasikan ideologi neoliberal melalui *Washington Consensus* yang terefleksikan dalam program-program penyesuaian

⁵⁹ Tempo, *Neoliberalisme dan Globalisasi* diakses dari <http://www.tempo.co/read/kolom/2009/06/15/86/Neoliberalisme-dan-Globalisasi> pada tanggal 31 Agustus 2013

struktural atau dikenal *Structural Adjustment Program*. Sedangkan WTO, mendesak agenda neoliberal melalui proyek perdagangan bebas.⁶⁰

Apa yang menjadi agenda dari institusi neoliberal tersebut telah diberlakukan di Indonesia sejak era Soeharto hingga SBY. Baik itu dalam wujud bantuan luar negeri maupun utang, dan pembuatan perundang-undangan.

Di era Soekarno, ia dipaksa menandatangani empat UU sebelum ia secara resmi dilengserkan dari kekuasaannya. Keempat UU itu adalah: *pertama*, UU No. 7/1966 tentang penyelesaian masalah utang-piutang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda; *kedua*, UU No. 8/1966 tentang pendaftaran Indonesia sebagai anggota ADB. *Ketiga*, UU No. 9/1966 tentang pendaftaran kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan Bank Dunia. *Keempat*, UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).⁶¹

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO yang telah meratifikasi seluruh kesepakatan WTO berdasarkan UU No.7 Tahun 1994 telah mengimplementasikan ketentuan Artikel GATT tersebut melalui PP No.34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti *Dumping* dan Bea Masuk Imbalan (Erlina, 2006).

Melalui pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto ini, para ekonom “Mafia Berkeley” yang sejak jauh-jauh hari telah dipersiapkan oleh AS, secara sistematis

⁶⁰ Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, CAPS, Yogyakarta, 2011, hal. 66

⁶¹ Revisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme*, dalam <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm>, diakses 1 Agustus 2013.

berusaha membelokkan orientasi penyelenggaraan perekonomian Indonesia dari ekonomi kerakyatan menuju ekonomi pasar neoliberal. Tindakan pembelokan orientasi tersebut didukung sepenuhnya oleh IMF, Bank Dunia, USAID, dan ADB dengan cara mengucurkan utang luar negeri.

Soeharto juga pernah dipaksa untuk menandatangani pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara terinci melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan IMF pada 1998, yaitu sebelum ia secara resmi dipaksa untuk mengakhiri kekuasaannya melalui sebuah gerakan politik yang dikenal sebagai gerakan reformasi.⁶²

Penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal itu antara lain tertangkap tangan melalui pembatalan seluruh atau beberapa pasal yang terdapat dalam tiga produk perundang-undangan, yang terbukti melanggar konstitusi, sebagai berikut: (1) UU No. 20/2002 tentang Kelistrikan; (2) UU No. 22/2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas); dan (3) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.

Termasuk dalam penyusunan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Asian Development Bank (ADB) punya peran penting dalam hal ini. Lembaga ini memberi pinjaman kepada pemerintah Indonesia senilai US \$ 250 juta atau Rp 2,3 triliun (kurs 1 US\$=Rp 9.500. Pinjaman ini disetujui pada 10 Desember 2002. Tapi pinjaman ini bukan sekadar pinjaman.

⁶² Revrison Baswir, *Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberalisme*, dalam <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul59.htm>, diakses 1 Agustus 2013.

Ada embel-embel yang menyertainya, yakni program "Financial Governance and Social Security Program (FGSSR)" atau Program Tata Kelola Keuangan dan Reformasi Jaminan Sosial. ADB mensyaratkan bisa memasukkan bantuan teknis (*technical assistance*) dalam program tersebut.

Salah satu butir dalam proposal kerja sama itu berbunyi: "*Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain.*"

Produk tahun 1995, yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal. Ciri penting dari kedua undang-undang tersebut adalah masuknya beberapa doktrin dan prinsip hukum yang selama itu dianggap berasal dari tradisi *Common Law*. Doktrin yang selama ini hanya ditemukan *Common Law* seperti manipulasi pasar, pemisahan kepemilikan efek, kewajiban fidusia bagi direksi dan komisaris, dan *piercing the corporate veil* berhasil menjadi bagian integral dari hukum Indonesia.

Setelah krisis pada 1998, reformasi hukum ekonomi kembali menjadi prioritas pertama akibat, antara lain, peran IMF dan Bank Dunia saat itu. Dalam proses itu, Indonesia harus setuju untuk melakukan tidak saja perubahan beberapa kebijakan pokok tetapi juga reformasi beberapa pranata penting perekonomian. Beberapa produk dari periode itu adalah di bidang kepailitan, perbankan, jaminan fidusia,

antimonopoli, selain perombakan sektor dan pengaturan perbankan. Segenap produk hukum ini telah menjadi komponen dan fondasi penting dari pranata hukum ekonomi yang ada kini.

Sejak 1998 sd 2009 lebih kurang 474 UU telah disahkan. Yang paling menyedihkan adalah UU bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Ciri umum UU tsb adalah ; 1. Hilangnya campur tangan negara dalam perekonomian dan diserahkan pada mekanisme pasar. 2. Penyerahan kekuasaan pada modal besar/asing dalam rangka ekspansi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. 3. Perlakuan diskriminatif terhadap mayoritas usaha rakyat.⁶³ Tidak heran karena biaya amandemen UUD 45 dan pembuatan UU dibiayai UNDP, NDI, BANK DUNIA, ADB, USAID total \$ US 740 juta.

Mekanisme pasar ternyata membuat perekonomian Indonesia semakin jatuh. Terbukti, kebutuhan dasar rakyat meliputi sandang, pangan dan papan menjadi mahal. Ini tidak lepas dari bahayanya praktik neoliberalisme melalui empat hal berikut.

Pertama, penghapusan subsidi. Subsidi adalah transfer sumber daya ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung dari negara kepada anggota masyarakat. Subsidi sangat bermanfaat bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat. Di antaranya dapat dipakai untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, membantu kelompok yang rentan dan mendistribusikan hasil produksi nasional dari sektor

⁶³ IGJ, April 2010 diakses dari <http://www.globalmuslim.web.id/2011/06/inilah-fakta-data-neoliberalisme-sby.html>, pada tanggal 1 Agustus 2013

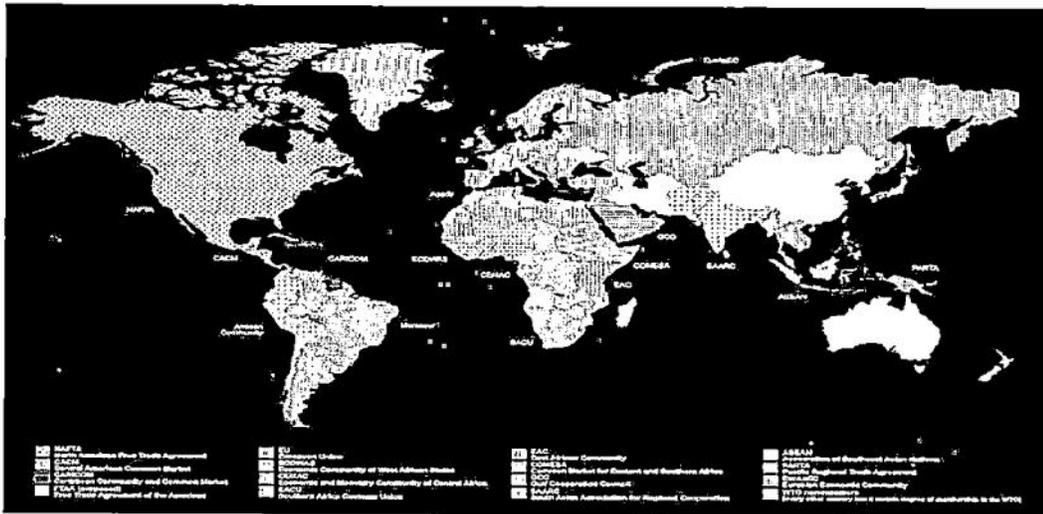
privat ke sektor publik. Dengan dihilangkannya subsidi, maka sangat berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Kedua, liberalisasi keuangan. Liberalisasi keuangan melalui enam aspek; deregulasi tingkat suku bunga, peniadaan pengendalian kredit, privatisasi bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Negara, peniadaan hambatan bagi bank-bank atau lembaga keuangan swasta, termasuk asing untuk memasuki pasar keuangan domestik, pengenalan alat-alat pengendalian moneter berbasis pasar dan liberalisasi neraca modal. Akibatnya, perekonomian menjadi kacau. Pasalnya, peredaran uang terpusat pada pelaku bisnis yang bisa mempermainkan sektor riil.

Ketiga, liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dilakukan dengan penghapusan hambatan non tariff (proteksi) dan penurunan tarif perdagangan dalam transaksi perdagangan internasional. Ini sangat berbahaya bagi Negara-negara miskin, termasuk Indonesia.

Keempat, privatisasi BUMN. Artinya, penjualan sebagian atau seluruh saham BUMN oleh pemerintah kepada para pemodal swasta. Privatisasi mengakibatkan berkurangnya kemampuan negara untuk melindungi kepentingan Negara dan masyarakatnya, semakin tergantungnya pemerintah terhadap pengaruh dan kekuasaan sector swasta dan meningkatnya polarisasi sosial dan ekonomi antara golongan kaya dan miskin.

Gambar 2.1 Map of trading blocs around the world.⁶⁴



⁶⁴ Book Excerpt: *The Hyperborder in a Globalized World* diakses dari http://www.pbs.org/pov/9starhotel/hyperborder_09.php pada 5 Juli 2013